Malam yang Menolak Menjadi Hanya Sebuah Malam

Published August 29, 2025 Uncategorized Leave a Comment

> *State is the name of the coldest of all cold monsters. Coldly it lies too; and this lie creeps from its mouth: 'I, the state, am the people.'*
>
> *— Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra*

Demonstrasi besar-besaran terjadi tepat di hari ulang tahunku.

Aku merasakan tetes-tetes air hujan yang jatuh menepis dari atap terbuka. Gelas alkohol berputar searah jarum jam, ke kawanku yang satu dan yang lain, mengiringi malam perayaan hari ulang tahunku seperti sebuah orkestra yang tersesat di antara peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di luar sana. Absurditas memang terjadi di keseharian. Tawa yang pecah berdampingan dengan kabar-kabar duka di jalanan. Dalam pengaruh alkohol, aku tak tahu harus menempatkan diriku di mana: bagian dari perayaan kecil ini, atau peristiwa besar yang sedang bergulir. Sejarah seakan terus menekan dalam waktu yang membebani setiap individu seperti lapisan abu vulkanik, bukan dalam bentuk buku atau arsip.

"Anjing, ini ada *driver* ojol dilindes mobil polisi!" kawanku tersentak sambil memperlihatkan video insiden tersebut yang ditangkap dari kamera amatir pedestrian. "Affan Kurniawan. Sempet dibawa ke rumah sakit, tapi terus meninggal."

"A.C.A.B.!" seru kawanku yang lain, kurasa tanpa benar-benar memahami bobot dari seruannya tersebut.

"Polisi emang bajingan, tapi Negara lebih bajingan" gerutuku.

Sejak awal kepemimpinan Prabowo, aku mengamati bagaimana pemerintahannya membuat banyak gebrakan (atau lebih tepatnya, manuver) politik. Gelombang kerusuhan dan protes yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh satu kebijakan tunggal (seperti kenaikan tunjangan anggota DPR yang marak dibicarakan baru-baru ini). Ia merupakan akumulasi dari rangkaian ketidakpuasan sipil terhadap kebijakan-kebijakan "oportunis" pemerintah seperti sentralisasi fiskal, reformasi militer, hingga praktik-praktik legislatif yang tidak transparan. Pemotongan anggaran daerah hingga 25% untuk kemudian diarahkan ke program nasional (misalnya program makan gratis yang masih segar di ingatan) mengingatkanku pada praktik sentralisasi pembangunan *a la* Orde Baru, ketika pemerintah pusat mengendalikan hampir semua alokasi dana, sementara pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana. Mega proyek Danantara, yang resmi diluncurkan awal-awal tahun ini, juga menggaungkan pola sentralisasi yang tertutup. Sebagai *sovereign wealth fund* (SWF) yang mengelola aset negara senilai sekitar 900 miliar dolar (kurang lebih 15 triliun rupiah)—termasuk tujuh BUMN besar:

Mandiri, BNI, BRI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID—proyek Danantara mencirikan apa yang kupahami sebagai *sentralisme kapital*, yang menegaskan semua kendali atas aset strategis untuk dikonsolidasikan ke dalam satu badan kuat (yang lagi-lagi, mengulang pola era Orde Baru). Hal ini berpotensi menjadikan proyek Danantara sebagai "*safe haven*" bagi banyak pelaku tindakan korupsi, terlebih brengseknya karena ada klausul dalam UU BUMN yang menyatakan bahwa kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara, yang artinya, *ruang impunitas bagi elit*.

Dominasi koalisi besar di DPR yang nyaris tanpa oposisi juga turut mempertebal kesan bahwa fungsi *checks and balances* telah lumpuh di tubuh pemerintahan, menjadikannya sekadar "stempel" bagi kebijakan eksekutif daripada wadah aspirasi dan kritik.

Narasi tentang Neo-Orde Baru mencuat.

Revisi UU TNI 2025 menjadi salah satu simbol paling kuat kebangkitan Neo-Orde Baru. Undang-undang ini membuka kesempatan bagi perwira aktif untuk menjabat posisi sipil, serta memperluas mandat militer dalam urusan non-militer (misalnya penanganan kasus-kasus narkotika dan urusan publik). Bukankah ini mengingatkan dengan dwifungsi ABRI era Soeharto? Di mana militer bukan sekadar berfungsi sebagai alat pertahanan Negara, tapi juga alat politik dan ekonomi (baca: korporasi) yang memproduksi ketakutan, menekan oposisi, dan merawat kepentingannya sendiri di atas kepentingan publik. Garis demarkasi antara sipil dan otoritas militer kembali terkikis. Mereka kini bisa saja kembali ikut campur dalam wilayah yang seharusnya menjadi wilayah sipil: kebijakan publik, bisnis, bahkan pengelolaan birokrasi sehari-hari. Sejak awal tahun (dan tahun-tahun sebelumnya), penanganan demonstrasi pun sudah banyak ditandai oleh tindakan represif. Masih ingat kasus penembakan mahasiswa di Wadas, bentrok berdarah di Rempang, insiden Kanjuruhan, atau bahkan jejak kekerasan yang lebih jauh lagi—dari tragedi Semanggi hingga kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua—yang semuanya memperlihatkan wajah serupa, yaitu militer (sebagai aparatus represif Negara *dan* korporasi) yang sengaja diterjunkan untuk menekan aksi protes atau pergerakan sipil. Pola itu terus berulang, demonstrasi dianggap ancaman ketertiban, aspirasi sipil disamakan dengan gangguan stabilitas Negara. Represifitas ini menciptakan efek spiral ketidakpercayaan, yang bagiku justru menguntungkan, sebab Negara (sebagai Leviathan) sedang menunjukkan wajah aslinya.

Konsep Negara sebagai Leviathan muncul dalam teks seminal Hobbes yang berjudul *Leviathan* (1651). Dalam teks tersebut, ia menggambarkan Negara sebagai monster raksasa (Leviathan) yang dibentuk dari *tubuh-tubuh individu*, di mana individu *menyerahkan hak-haknya demi perlindungan kolektif*, yang terkonsentrasi pada satu sosok penguasa: Leviathan, yang "melindungi" setiap individu, tapi sekaligus punya kuasa penuh terhadapnya. Ibarat seekor makhluk laut purba yang berenang di antara misi ketakjuban dan ketakutan, Leviathan dalam imajinasi Hobbes bukan sekadar kiasan. Ia adalah gambaran konkret tentang bagaimana kekuasaan bekerja, tubuh raksasa yang tersusun dari tubuh-tubuh kecil, dari individu-individu yang melepas sebagian kebebasannya demi keamanan. Rosseau, di sisi lain, menegasikan konsep ini lewat *Du Contrat Social* (1762). Ia menganggap kontrak sosial bukan penyerahan hak mutlak pada penguasa, melainkan pengalihan pada *volonté générale* (kehendak umum). Leviathan bagi Rosseau, bukanlah monster absolut seperti dalam bayangan Hobbes, melainkan *tubuh kolektif* yang "idealnya" menjamin kebebasan bersama. Masalahnya, apa yang terjadi ketika Leviathan yang seharusnya menjadi *satu tubuh dari banyak individu* berubah menjadi aparatus represif Negara yang otonom, yang memisahkan diri dari tubuhnya (baca: rakyatnya) sendiri? Yang menjaga sekaligus menelan, "mengayomi" sekaligus menekan, melindungi dari kekacauan dengan menciptakan keteraturan yang sering kali justru lebih menakutkan daripada kekacauan itu sendiri?

Aparatus represif Negara (seperti militer dan polisi), bukanlah sekadar "penegak hukum," melainkan *manifestasi langsung dari Negara* (Tiqqun). Aparatus represif adalah Leviathan dalam bentuk paling vulgar, bukan melalui ide atau hukum-hukum tertulis, tapi melalui kekerasan yang bisa dirasakan langsung di udara lewat gas air mata, lewat *water cannon* yang merobek jalanan, lewat roda mobil *barracuda* Brimob yang melindas tubuh Affan. Mereka adalah bahasa tubuh Negara, bahasa yang hanya mengenal kata kerja: mengusir, memukul, menembak, menggilas.

Ketika aparat melindas, itu bukan kecelakaan. Itu adalah Leviathan yang berbicara dengan dialek asli kekuasaannya: *kekerasan*.

> *Where should we go after the last frontiers? Where should the birds fly after the last sky?*
>
> *— Mahmoud Darwish*

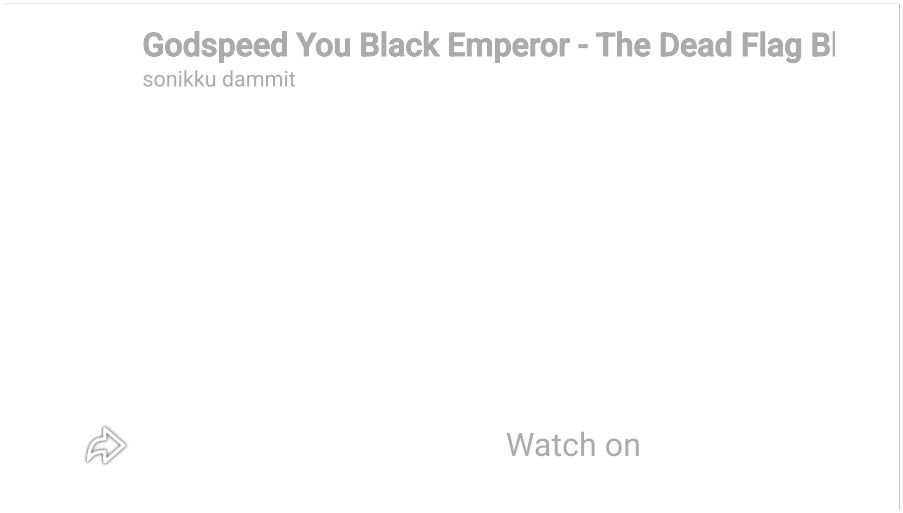

0 Responses to “Malam yang Menolak Menjadi Hanya Sebuah Malam”

Leave a Comment

Leave a comment